

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana. hlm. 14
- Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi. 2013. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : NUANSA.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Palembang : Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas
- Laksanto Utomo. 2020. *Hukum Jaminan Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia
- Nomensen Sinamo. 2020. *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*. Bandung: Permata Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S, F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

—————. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Wahono Sumadiono, 2018, *Pedoman Umum Organisasi dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*, Jakarta: CV Budi Utama, Cet 1

Skripsi,Tesis & Disertasi

Andryan. 2024. *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina*. Skripsi. Medan : Universitas Medan Area.

Arie Purnomosidi. 2012. *Negara Hukum Pancasila (Analisis Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen*. Tesis. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana.

Deka Zahara Lutfiani Laeli. 2022. *Efektivitas Penggunaan E-Government Di Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Juni Sarah. 2022. *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

Reski Wardani. 2023. *Digitalisasi Pelayanan Publik : Studi Fenomenologi Tentang Makna Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin

Jurnal

Ani Yunaningsih. *et al*. 2021. *Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisas*. Jurnal Pariwisata Indonesia. Volume 3 Nomor 1. Batam : Universitas Internasional Batam.

- Ariani Arifin. *et al.* 2020. *Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 4 Nomor 2. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan. Medan.
- Catherine Panggabean & Nur Laila Meilani. 2023. *Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Aplikasi Pekanbaru Dalam Genggaman Dalam Tinjauan Digital Era Governance)*. Jurnal Riset Ilmiah. Volume 2 Nomor 3. Riau: Ejournal Institut Pendidikan Nusantara Global.
- Djakit Prihartono. 2023. *Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 14 Nomor 2. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ikhsan Bagus Permadi & Ali Rokhman. 2023. *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi*, JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, Volume 4 Nomor 2. Universitas Jenderal Soedirman
- Indah Puji Lestari & Lalu Moh Nazar Fajri. 2022. *Analisis E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. Jurnal Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 2. Mataram : Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.
- Isya Anung Wicaksono & Farma Ulfatun Najicha. 2021. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*, Pangaruyan Law Journal. Volume 5 Nomor 1. Fakultas Hukum Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Rini Oktavianti, Nawawi Natsir, dan Nuraisyah. 2024. *Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Aplikasi E-Pusluh Di Bidang Penyuluhan Kota Palu*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama. Volume 2 Nomor 3. Jakarta

Rofieq, A. 2011. *Pelayanan publik dan welfare State*. Governance. Volume 2 Nomor 1.

Sarah Dinda Hanifa dan Nida Handayani, 2024, *Penerapan Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor-Cileungsi*, Jurnal Media Administrasi, Volume 9 Nomor 1. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

Syalom M.C. Lenak, Ismail Sumampow, dan Welly Waworundeng. 2021. *Efektifitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon*, Jurnal Governance. Volume 1 Nomor 1. Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

V. Hadiyono, 2020, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Volume 1 Nomor 1. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Sumber Internet

Muchlis Abduh. 2024. *“Disdukcapil Parepare Genjot IKD 33 Ribu Warga, Urus Dokumen Wajib Aktivasi”*. Detik Sulsel. Edisi Tanggal 3 Juli 2024.

Muhammad Tohir. 2024. *“Disdukcapil Parepare Mudahkan Layanan Lewat ‘Jebol’ Perekaman e-KTP hingga Sosialisasi IKD”*. Pijar News. Edisi Tanggal 14 Agustus 2024.

Ridho Kurniawan Siregar. 2022. *“NIK Sebagai NPWP Dan Potensi Sinergi DJP-DJKN”*, Artikel DJK, Edisi Tanggal 26 September 2022

Pengelola Web Kemdikbud. 2019. *“Integrasi Data, NISN Diganti Dengan Nomor Induk Kependudukan”*. Kemendikbud.go.id. Edisi Tanggal 23 Januari 2019

Nurul Fatmawati. 2022. *“Mengenal Lebih Dekat Kebutuhan Pengguna Pelayanan”*. Artikel DJKN, Edisi Tanggal 24 Februari 2022